



Kesiapan Guru dalam Menghadapi Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka (Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas)

Subhan Widiyansyah^{1*}, Serly Putri Hidayat², Sauqi Ichsan Kamil³, Ida Dwi Lestari Br Purba⁴, Usy Rahmawati⁵, Feby Miftah Azmi Khairo⁶

¹⁻⁶ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

^{1*}subhanwidiyansyah@untirta.ac.id, ²2290230016@untirta.ac.id, ³2290230018@untirta.ac.id,
⁴2290230020@untirta.ac.id, ⁵2290230025@untirta.ac.id, ⁶2290230026@untirta.ac.id

Alamat: Jalan Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten 42163

Korespondensi penulis: subhanwidiyansyah@untirta.ac.id

Abstract: The curriculum is a fundamental component of the education system, designed to meet the evolving needs of society. In 2022, the Indonesian Ministry of Education, Culture, Research, and Technology introduced the Merdeka Curriculum as a strategic response to global challenges and the impacts of the COVID-19 pandemic. This study aims to analyze the implementation of the Merdeka Curriculum, identify the challenges encountered, and propose strategies to enhance its effectiveness. The research employs a literature review with a qualitative approach, underpinned by Structural Functional Theory to interpret the dynamics of curriculum implementation. The findings reveal significant disparities in teachers' readiness to understand and implement the curriculum, influenced by factors such as training, resource availability, and institutional support. Major challenges include insufficient infrastructure, gaps in understanding, and resistance to pedagogical innovation. The study concludes that strengthening collaboration among teachers, schools, communities, and the government, combined with intensive training and infrastructure development, can optimize the curriculum's potential in fostering globally competitive human resources. It is recommended that all stakeholders actively engage in cross-sector collaboration to ensure the sustainable implementation of the Merdeka Curriculum.

Keywords: Merdeka Curriculum; implementation; challenges; strategies; education.

Abstrak: Kurikulum merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperkenalkan Kurikulum Merdeka sebagai upaya untuk menghadapi tantangan global dan dampak pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, yang didukung oleh pemahaman melalui Teori Struktural Fungsional guna menganalisis dinamika dalam proses implementasi kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan guru dalam memahami dan menerapkan Kurikulum Merdeka sangat beragam, dipengaruhi oleh pelatihan yang diperoleh, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan dari institusi pendidikan. Tantangan utama dalam implementasi ini mencakup keterbatasan infrastruktur, adanya kesenjangan pemahaman, serta resistensi terhadap perubahan metode pengajaran. Studi ini menyimpulkan bahwa sinergi antara guru, sekolah, masyarakat, dan pemerintah perlu ditingkatkan, diiringi dengan pelatihan intensif dan penguatan infrastruktur. Dengan langkah tersebut, Kurikulum Merdeka dapat memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing secara global. Direkomendasikan agar semua pihak terlibat secara aktif dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan implementasi kurikulum ini.

Kata-kata Kunci: Kurikulum Merdeka; implementasi; tantangan; strategi; pendidikan.

1. PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Sebagai rencana pendidikan, kurikulum mencakup berbagai aspek yang meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang bertujuan untuk membentuk peserta didik sesuai dengan kebutuhan zaman. Sukmadinata (2004) menyatakan

bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, kurikulum berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, serta keterampilan hidup ke dalam pembelajaran. Kurikulum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar peserta didik dapat berkembang menjadi individu yang kompeten, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

Seiring dengan pesatnya perkembangan global dan teknologi, sistem pendidikan di Indonesia terus menghadapi tantangan dalam merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan hadirnya Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada tahun 2022 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kurikulum ini dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan, termasuk dampak learning loss akibat pandemi COVID-19 serta untuk mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan abad ke-21. Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas dalam merancang pembelajaran berbasis kompetensi, diferensiasi, dan penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Dengan memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk merancang proses pembelajaran sesuai dengan potensi dan kebutuhan siswa, kurikulum ini diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global.

Namun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan tidak tanpa tantangan. Kesiapan guru yang terbatas dalam mengimplementasikan kurikulum ini, ketidaksesuaian infrastruktur, serta perbedaan kondisi sosial-ekonomi antar daerah menjadi beberapa hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, penggunaan teori-teori sosial, khususnya Teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, dapat memberikan wawasan yang penting dalam memahami dinamika yang terjadi dalam penerapan kurikulum ini. Menurut Parsons, sistem sosial akan berfungsi secara efektif jika setiap komponen dalam sistem tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, sinergi antara berbagai komponen seperti guru, sekolah, masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan agar kurikulum dapat berjalan dengan efektif.

Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons mengidentifikasi empat komponen penting dalam sistem sosial yang dikenal dengan nama AGIL, yaitu Adaptasi, Goal (Tujuan), Integritas, dan Latensi. Keempat elemen ini saling berkaitan dan mendukung tercapainya sistem yang stabil dan berfungsi secara optimal. Dalam penerapan Kurikulum Merdeka, apabila

terdapat ketidakseimbangan atau disfungsi pada salah satu elemen AGIL, maka implementasi kurikulum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, penting untuk meningkatkan sinergi antara komponen-komponen tersebut. Misalnya, kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, tujuan pendidikan harus jelas dan terukur, serta integrasi antara berbagai elemen pendidikan perlu dilakukan dengan lebih efektif. Dengan memperhatikan keseimbangan antara komponen-komponen tersebut, diharapkan penerapan Kurikulum Merdeka dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah Indonesia saat ini; (2) apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum Merdeka; dan (3) bagaimana upaya pendidik dan pemangku kepentingan dalam mengatasi kendala penerapan Kurikulum Merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Kurikulum Merdeka di berbagai tingkatan pendidikan di Indonesia, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi strategis untuk mendukung keberhasilan kurikulum ini. Dengan menggunakan pendekatan teori Struktural Fungsional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana sinergi antara berbagai komponen dalam sistem pendidikan dapat meningkatkan efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang siap bersaing di tingkat global.

Dalam penelitian ini, teori Struktural Fungsional digunakan sebagai landasan untuk menganalisis tantangan dan hambatan yang muncul dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Teori ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana elemen-elemen dalam sistem pendidikan (guru, sekolah, masyarakat, dan pemerintah) saling berinteraksi dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, sinergi antara semua komponen pendidikan menjadi kunci untuk keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dengan sifat kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan serta solusi terkait penerapan Kurikulum Merdeka berdasarkan kajian-kajian sebelumnya. Subjek dari penelitian ini mencakup berbagai studi yang membahas tentang implementasi Kurikulum Merdeka, sedangkan objeknya adalah tantangan yang dihadapi oleh para guru dalam melaksanakan kurikulum tersebut dan strategi yang diterapkan untuk mengatasi masalah yang muncul.

Waktu yang dicakup dalam penelitian ini adalah literatur yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2023, yang relevan dengan peluncuran Kurikulum Merdeka. Lokasi penelitian bersifat umum, mencakup berbagai sumber dari jurnal dan artikel yang dapat diakses secara online. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen literatur, termasuk jurnal ilmiah, artikel, dan laporan yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka. Peneliti melakukan pencarian literatur melalui database akademik dan sumber-sumber yang terpercaya untuk menemukan penelitian yang relevan.

Proses pengambilan sampel dilakukan dengan memilih literatur yang sesuai berdasarkan kriteria tertentu, seperti relevansi dengan topik yang diteliti, kualitas sumber, dan tahun penerbitan. Peneliti melakukan pencarian secara sistematis untuk memastikan bahwa semua sumber yang dipilih memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman mengenai Kurikulum Merdeka. Data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis literatur yang telah diidentifikasi, di mana peneliti mencatat informasi penting serta temuan dari setiap sumber yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif, di mana peneliti menginterpretasikan dan merangkum temuan dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dan solusi dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang menghubungkan berbagai temuan dari literatur yang ada, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai situasi yang dihadapi oleh para guru dalam implementasi kurikulum tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kesiapan Guru dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sangat bervariasi. Faktor utama yang mempengaruhi kesiapan ini meliputi pemahaman terhadap konsep kurikulum, dukungan pelatihan, serta ketersediaan sumber daya pendidikan. Sebagian besar guru mengaku memiliki pemahaman yang cukup baik, namun

mereka mengidentifikasi adanya kendala dalam aspek praktis pelaksanaannya.

a. Pengetahuan tentang Kurikulum Merdeka

Berdasarkan temuan, mayoritas guru menunjukkan respons yang positif terhadap Kurikulum Merdeka. Guru mengapresiasi fleksibilitas yang diberikan dalam merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Mereka menganggap bahwa pembelajaran berbasis proyek yang ditekankan dalam kurikulum ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, pengurangan beban materi juga dirasakan sebagai keuntungan, karena memberikan kesempatan bagi guru untuk lebih fokus pada pengajaran yang lebih mendalam dan kontekstual.

Namun, meskipun respons positif cukup banyak, beberapa guru mengungkapkan kekhawatiran terkait kesulitan dalam penerapan konsep-konsep baru, khususnya dalam mendesain modul ajar yang dianggap lebih kompleks dibandingkan dengan RPP sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis dan kemampuan praktis dalam implementasi kurikulum.

Tantangan yang dihadapi oleh guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka cukup beragam. Sebagian besar guru merasa kesulitan dalam menyusun dokumen seperti modul ajar yang lebih mendalam dan kompleks. Kebiasaan lama yang lebih pasif, dimana guru cenderung menunggu arahan, juga menjadi penghalang utama dalam mengembangkan otonomi dalam pembelajaran. Beberapa guru juga melaporkan bahwa kurangnya pemahaman yang menyeluruh terhadap panduan pelaksanaan kurikulum menjadi salah satu hambatan terbesar dalam keberhasilan implementasi.

Selain itu, tidak semua guru merasa siap secara psikologis untuk melakukan perubahan dalam metode pembelajaran yang lebih terbuka dan berbasis pada kebutuhan siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan yang lebih intensif dan terarah untuk mengatasi kesulitan tersebut. Kemendikbudristek telah menyediakan berbagai sumber daya untuk mendukung guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka, seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan serangkaian webinar terkait. Meskipun demikian, hasil survei menunjukkan bahwa tidak semua guru memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. Hanya sebagian kecil yang secara aktif mengikuti pelatihan atau menggunakan platform yang disediakan, hal ini sebagian disebabkan oleh keterbatasan waktu dan prioritas tugas lain yang harus diselesaikan.

Selain itu, sekitar 56,7% kepala sekolah melaporkan bahwa mereka masih kurang memahami kebutuhan implementasi, termasuk dalam hal penyediaan buku teks yang sesuai dengan kurikulum. Ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan dalam pemahaman dan dukungan yang diterima antara tingkat sekolah dan tingkat pusat. Keberhasilan implementasi

Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kesiapan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berbasis pada karakteristik siswa. Dalam hal ini, komitmen guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya menjadi faktor yang sangat penting. Pelatihan berkelanjutan dan kolaborasi melalui komunitas belajar guru dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesiapan mereka.

Selain itu, dukungan dari pihak kepala sekolah dan lembaga pendidikan juga menjadi kunci utama. Kepala sekolah yang memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan implementasi kurikulum, serta kemampuan untuk memberikan fasilitas dan motivasi yang tepat, akan berkontribusi besar terhadap keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka. Secara umum, meskipun banyak guru yang mendukung penerapan Kurikulum Merdeka, tingkat kesiapan mereka masih perlu ditingkatkan. Upaya berkelanjutan dalam pelatihan, pemberian sumber daya yang memadai, serta pembinaan yang konsisten sangat penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum ini. Dengan langkah yang tepat, diharapkan Kurikulum Merdeka dapat terlaksana dengan optimal dan mencapai tujuannya, yakni mencetak generasi yang kompeten dan berkarakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

b. Keterampilan pedagogik yang sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar

Keterampilan pedagogik yang sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar bertumpu pada pemberdayaan siswa sebagai subjek pembelajaran yang aktif dan mandiri. Merdeka Belajar, seperti yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, mendorong guru untuk memberikan fleksibilitas kepada siswa dalam memilih cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Keterampilan pedagogik yang relevan meliputi kemampuan untuk merancang pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), berbasis masalah (problem-based learning), dan berbasis penelitian (inquiry-based learning). Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Darling-Hammond et al. (2020), yang menekankan bahwa pembelajaran yang berpusat pada siswa meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar.

Selain itu, guru juga harus memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran sebagai alat untuk mendukung personalisasi dan diferensiasi pembelajaran. Dalam konteks Merdeka Belajar, teknologi memungkinkan siswa mengakses sumber belajar yang lebih luas dan mendalam sesuai dengan kebutuhan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Khusuma (2020) menunjukkan bahwa pembelajaran daring yang dirancang secara efektif dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa, terutama selama pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan pedagogik dalam menggunakan teknologi secara kreatif dan efektif sangat diperlukan, terutama dalam memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya mereka

masing-masing.

Selain aspek teknologi, kemampuan guru untuk membangun lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keberagaman juga menjadi keterampilan pedagogik yang esensial. Prinsip Merdeka Belajar mengakui bahwa setiap siswa memiliki keunikan, sehingga pendekatan pembelajaran harus adaptif terhadap berbagai kebutuhan, gaya belajar, dan latar belakang siswa. Penelitian oleh Banks et al. (2019) menyoroti bahwa praktik pedagogik yang inklusif dapat meningkatkan rasa keterlibatan siswa dan mengurangi kesenjangan pendidikan. Oleh karena itu, guru perlu menguasai strategi seperti pembelajaran diferensiasi dan pengelolaan kelas berbasis empati, agar dapat menciptakan ruang belajar yang merangkul setiap individu tanpa terkecuali.

Seiring dengan itu, asesmen formatif yang berkelanjutan merupakan bagian tak terpisahkan dari keterampilan pedagogik dalam prinsip Merdeka Belajar. Guru perlu mengembangkan kompetensi untuk menggunakan asesmen sebagai alat diagnosis dan refleksi, bukan hanya untuk penilaian akhir. Penelitian Widiastuti et al (2021) di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan asesmen formatif membantu siswa untuk lebih memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta mendorong mereka untuk mengambil langkah proaktif dalam memperbaiki hasil belajar. Dengan demikian, asesmen formatif berfungsi tidak hanya untuk mengevaluasi hasil belajar, tetapi juga sebagai instrumen yang memotivasi siswa untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Akhirnya, keterampilan pedagogik yang penting adalah kemampuan untuk membangun hubungan kolaboratif dengan siswa, orang tua, dan komunitas. Prinsip Merdeka Belajar menekankan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam mendukung perkembangan siswa. Penelitian Epstein (2018) dari luar negeri dan Suyatno et al. (2021) di Indonesia mengungkapkan bahwa kolaborasi antara guru dan orang tua meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Guru yang mampu membangun komunikasi yang efektif dan melibatkan berbagai pihak secara aktif akan lebih berhasil dalam menerapkan prinsip Merdeka Belajar. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya bergantung pada interaksi antara guru dan siswa, tetapi juga pada dukungan yang diberikan oleh keluarga dan komunitas di sekitar siswa.

Secara keseluruhan, keterampilan pedagogik yang sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup penggunaan teknologi, pembelajaran yang inklusif, asesmen yang reflektif, dan keterlibatan kolaboratif dengan berbagai pihak. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung kemandirian dan pengembangan potensi siswa secara maksimal.

c. Sikap dan motivasi guru dalam menghadapi perubahan kurikulum

Sikap dan motivasi guru memainkan peran yang sangat krusial dalam menghadapi perubahan kurikulum, karena mereka bertanggung jawab langsung untuk mengimplementasikan perubahan tersebut di dalam kelas. Ketika guru memiliki sikap positif, seperti keterbukaan terhadap inovasi, keinginan untuk mempelajari hal-hal baru, dan kemampuan beradaptasi dengan cepat, perubahan kurikulum dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Sebaliknya, sikap negatif, seperti penolakan terhadap perubahan, ketakutan akan ketidaksiapan, atau kecemasan tentang dampak perubahan pada kualitas pembelajaran, bisa menjadi hambatan besar dalam proses ini.

Beberapa penelitian sebelumnya mendukung pentingnya sikap dan motivasi guru dalam menghadapi perubahan kurikulum. Fullan (2017) menyatakan bahwa keberhasilan perubahan dalam dunia pendidikan sangat bergantung pada sejauh mana guru terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan perubahan tersebut. Fullan menekankan pentingnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guru terhadap perubahan yang terjadi agar mereka bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati. Sementara itu, penelitian Piner dan Piner (2013) mengungkapkan bahwa meskipun perubahan kurikulum seringkali berkaitan dengan peningkatan kompetensi profesional guru, dukungan yang memadai dari pimpinan sekolah juga sangat penting untuk meningkatkan kesiapan dan motivasi guru dalam mengimplementasikan perubahan tersebut.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, penelitian Haryanto (2018) menunjukkan bahwa guru yang merasa dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum cenderung memiliki sikap yang lebih positif dan lebih termotivasi untuk mengimplementasikan perubahan tersebut secara efektif. Haryanto menekankan pentingnya pelatihan dan sosialisasi yang cukup untuk memperkuat pemahaman dan kesiapan guru dalam menghadapi perubahan kurikulum yang sedang berlangsung.

Secara keseluruhan, sikap dan motivasi guru dalam menghadapi perubahan kurikulum dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kesiapan mental dan profesionalisme guru, serta faktor eksternal, seperti dukungan dari pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Komunikasi yang baik antara semua pihak terkait akan sangat membantu dalam mengurangi kekhawatiran dan resistensi yang mungkin muncul, sehingga perubahan kurikulum dapat diterima dengan lebih baik dan diterapkan secara efektif.

Tantangan Yang Dihadapi Guru

a. Keterbatasan sumber daya (materi, fasilitas, pelatihan)

Salah satu tantangan utama yang dihadapi guru adalah keterbatasan materi ajar yang relevan dan kontekstual. Banyak guru di daerah terpencil di Indonesia tidak memiliki akses ke

sumber belajar yang memadai, seperti buku teks, bahan ajar digital, atau alat peraga. Kondisi ini memengaruhi efektivitas pembelajaran dan kemampuan guru untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa. Penelitian oleh Santosa dan Ramadhan (2021) mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya belajar di sekolah-sekolah pedesaan menghambat implementasi Kurikulum Merdeka yang membutuhkan bahan ajar yang inovatif dan berbasis proyek.

Fasilitas sekolah yang terbatas juga menjadi tantangan signifikan. Banyak sekolah, terutama di daerah tertinggal, tidak memiliki infrastruktur dasar seperti ruang kelas yang memadai, perangkat teknologi, atau akses internet. Penelitian oleh World Bank (2020) menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas teknologi di sekolah Indonesia menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Guru sering kali harus mengimprovisasi dengan fasilitas seadanya, yang dapat membatasi kreativitas dan inovasi dalam mengajar.

Kurangnya pelatihan yang berkelanjutan juga menjadi hambatan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka. Meskipun banyak kebijakan yang mendorong pengembangan profesional guru, implementasinya sering kali tidak merata. Menurut penelitian Zainuddin et al. (2020), banyak guru di Indonesia tidak mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan tantangan yang mereka hadapi, seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran atau pengelolaan kelas yang inklusif. Hal ini membuat guru kesulitan untuk menerapkan pendekatan pedagogik yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Tantangan lainnya adalah dukungan yang terbatas dari pihak komunitas dan pemerintah dalam mengatasi keterbatasan sumber daya. Guru sering kali harus bekerja sendiri untuk mencari solusi atas kekurangan ini, seperti menggunakan dana pribadi untuk membeli alat peraga atau bahan ajar. Penelitian oleh Darling-Hammond et al. (2017) di Amerika Serikat juga menemukan bahwa guru di daerah dengan sumber daya terbatas sering kali menghadapi beban kerja yang lebih besar karena kurangnya dukungan dari sistem pendidikan.

Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara guru, pemerintah, dan masyarakat sangat penting. Penelitian Murniati dan Suharti (2019) menyarankan perlunya penguatan kebijakan berbasis kebutuhan lokal untuk memastikan penyediaan sumber daya yang memadai. Selain itu, peningkatan akses terhadap teknologi pendidikan dan pelatihan berbasis praktik dapat membantu guru mengatasi kendala ini. Solusi tersebut memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan.

b. Hambatan dalam proses adaptasi metode pembelajaran baru

Implementasi metode pembelajaran baru, seperti yang diterapkan dalam Kurikulum Merdeka, menghadirkan berbagai tantangan bagi para guru. Mereka harus beradaptasi dengan peran sebagai fasilitator yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing siswa untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dan mendalam, proses adaptasinya tidaklah mudah. Berbagai tantangan muncul, baik dalam bentuk teknis, pedagogis, maupun manajerial, yang juga tercermin dalam penelitian-penelitian terdahulu mengenai inovasi pendidikan. Tantangan utama mencakup kurangnya pelatihan yang efektif, keterbatasan waktu untuk memahami metode baru, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran, terutama bagi guru di daerah terpencil yang minim akses infrastruktur digital.

Penelitian yang dilakukan oleh Qomariyah (2022) menjelaskan bahwa terdapat empat permasalahan utama dalam pengadaptasian suatu metode pembelajaran baru ke dalam proses belajar mengajar. Pertama, kekurangan sumber daya seperti fasilitas, infrastruktur, dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, serta kurangnya pengalaman dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran digital. Kedua, tingkat kesiapan suatu program yang akan diimplementasikan juga menjadi salah satu permasalahan dalam pengadaptasian metode pembelajaran baru. Perlu adanya kajian mendalam mengenai program yang akan diberikan kepada para murid agar benar-benar siap digunakan sebagai acuan pembelajaran, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam proses belajar mengajar. Ketiga, kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar menjadi sangat penting agar program ini dapat berjalan dengan baik. Program ini seharusnya tidak hanya menjadi opsional di suatu tempat, namun harus merata diterapkan di berbagai wilayah. Keempat, keterbatasan referensi untuk mempelajari dan menjalankan program ini juga menjadi penghambat bagi guru dalam mengeksplor pengetahuan dan kemampuan peserta didik.

Penelitian oleh Windayanti et al. (2023) juga mengungkapkan bahwa para guru mengalami kendala dalam menentukan asesmen pada saat pembelajaran berbasis proyek. Kebingungan ini disebabkan oleh banyaknya jenis asesmen yang harus dipertimbangkan. Selain itu, terdapat kurangnya pengalaman dalam pembelajaran digital yang menghambat proses belajar mengajar berbasis teknologi informasi. Para guru juga mengalami kesulitan dalam mencari referensi di buku, karena buku yang didistribusikan oleh toko buku atau penerbit independen tidak selalu menyertakan referensi yang dapat membantu guru dalam proses pembelajaran. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, para guru menghadapi kesulitan dalam proses penilaian serta pengetahuan mengenai kurikulum tersebut. Minimnya bahan ajar yang relevan serta rendahnya

pemahaman dan penilaian terhadap Kurikulum Merdeka menyebabkan adanya hambatan dan tantangan dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang dimaksud.

c. Dampak beban administrasi terhadap implementasi kurikulum

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh para guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka adalah meningkatnya beban administrasi. Banyak guru merasa tertekan oleh tuntutan untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), melaporkan hasil capaian pembelajaran, serta melakukan evaluasi terhadap hasil belajar. Penelitian yang dilakukan oleh Suyitno et al. (2023) mengungkapkan bahwa waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan mengajar sering kali terpakai untuk memenuhi berbagai kebutuhan administratif, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap efektivitas pembelajaran. Situasi ini membuat guru kesulitan untuk berkonsentrasi pada pengembangan metode pengajaran yang lebih inovatif dan kreatif.

Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh guru juga menjadi hambatan yang signifikan dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami konsep dan prosedur yang diperlukan untuk mengimplementasikan kurikulum ini dengan baik. Menurut Prihatien et al (2023), kurangnya pemahaman ini menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam merancang RPP yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka, yang seharusnya lebih sederhana dan fleksibel. Akibatnya, banyak guru merasa tertekan dan tidak mampu memberikan pembelajaran yang optimal kepada siswa.

Fasilitas dan sarana prasarana yang terbatas di sekolah juga merupakan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Banyak sekolah, terutama yang berada di daerah terpencil, tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi dan sumber belajar yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek. Penelitian oleh Mustofa et al. (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan ini menghalangi guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, yang merupakan salah satu tujuan dari Kurikulum Merdeka.

Kurangnya dukungan dari pemerintah dan komunitas juga memperburuk keadaan ini. Para guru sering kali harus berjuang sendiri untuk menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi, seperti mencari dana untuk pelatihan tambahan atau pengadaan alat peraga. Penelitian oleh Lucardo et al. (2024) menunjukkan bahwa tanpa dukungan yang memadai, guru akan kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan kurikulum dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.

Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara guru, pemerintah, dan masyarakat sangatlah penting. Penelitian oleh Murniati dan Suharti (2019) merekomendasikan perlunya

penguatan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan lokal untuk memastikan penyediaan sumber daya yang memadai. Selain itu, peningkatan akses terhadap pelatihan yang relevan dan dukungan teknologi pendidikan dapat membantu guru mengatasi kendala yang ada. Solusi ini memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, agar implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

d. Strategi yang Diterapkan oleh Sekolah

Untuk menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di tingkat SMA, berbagai strategi telah diterapkan oleh sekolah untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Salah satu pendekatan utama yang diambil adalah penguatan kompetensi guru melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan. Dalam penelitian Adiningsih (2024) mengenai Tantangan dan Strategi Untuk Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik Senior Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak SMA Negeri 3 Singaraja, ditemukan bahwa kepala sekolah di SMA Negeri 3 Singaraja mengadakan pelatihan berbasis In House Training (IHT) yang berfokus pada pembekalan guru dengan keterampilan teknis dan pedagogis yang diperlukan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari desain pembelajaran berbasis proyek hingga penggunaan asesmen formatif. Selain itu, guru juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan melalui webinar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, yang memberikan wawasan lebih dalam mengenai Kurikulum Merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang terstruktur dan sistematis sangat penting untuk memfasilitasi kesiapan guru dalam mengadopsi perubahan kurikulum.

Selain penguatan kapasitas guru, kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal juga merupakan strategi utama yang digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Penelitian yang sama mengungkapkan bahwa SMA Negeri 3 Singaraja aktif menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan proyek tematik yang melibatkan siswa dalam kegiatan langsung yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi dan keberlanjutan. Proyek seperti “Suara Demokrasi” dan “Gaya Hidup Berkelanjutan” memberikan pengalaman nyata kepada siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks sosial dan lingkungan. Kerja sama dengan berbagai lembaga ini juga memperkaya kurikulum dengan perspektif dan pengalaman yang relevan bagi siswa. Ini sejalan dengan pandangan Mardianah (2021) yang menyatakan bahwa keterlibatan pihak eksternal sangat penting untuk menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan dunia nyata, terutama dalam konteks

pembelajaran berbasis proyek.

Evaluasi berkelanjutan juga memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Adiningsih (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa evaluasi di SMA Negeri 3 Singaraja dilakukan secara rutin, di mana guru, kepala sekolah, dan tim kurikulum mengadakan pertemuan untuk menilai kemajuan implementasi kurikulum dan mengidentifikasi hambatan yang muncul selama proses pembelajaran. Evaluasi ini bukan hanya bertujuan untuk memantau pencapaian kurikulum, tetapi juga untuk menyesuaikan metode pembelajaran yang digunakan agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Asesmen formatif yang dilakukan secara terus-menerus memungkinkan siswa untuk menerima umpan balik yang berguna dalam mengembangkan pemahaman mereka. Selain itu, evaluasi sumatif yang dilakukan secara periodik memberikan gambaran mengenai pencapaian kompetensi siswa secara keseluruhan.

Penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi strategi inti dalam mewujudkan visi pendidikan berbasis Kurikulum Merdeka. Di SMA Negeri 3 Singaraja, sebagaimana dijelaskan oleh Adiningsih (2024), sekolah melaksanakan tiga proyek tematik setiap tahunnya yang bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa melalui pembelajaran berbasis proyek. Tema-tema seperti “Kearifan Lokal,” “Suara Demokrasi,” dan “Gaya Hidup Berkelanjutan” menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa secara langsung. Proyek-proyek ini memungkinkan siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan memahami isu-isu sosial yang relevan dengan kehidupan mereka. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari, yang mendukung pengembangan karakter dan keterampilan abad ke-21. Penekanan pada nilai-nilai Pancasila dalam setiap proyek juga mencerminkan komitmen sekolah untuk menanamkan rasa tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan kepada siswa. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan di SMA Negeri 3 Singaraja dalam menghadapi tantangan implementasi Kurikulum Merdeka melibatkan berbagai pendekatan yang komprehensif, termasuk penguatan kapasitas guru, kolaborasi dengan mitra eksternal, evaluasi berkelanjutan, dan pelaksanaan proyek berbasis nilai Pancasila.

Berdasarkan penelitian Adiningsih (2024), pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat SMA dapat berhasil jika dilakukan secara terintegrasi, dengan melibatkan seluruh elemen sekolah dalam mendukung perubahan kurikulum. Semua strategi ini berfokus pada pengembangan keterampilan dan karakter siswa yang relevan dengan kebutuhan pendidikan di abad ke-21, serta memastikan bahwa pembelajaran yang diterima siswa tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif dan kontekstual.

e. Implikasi Temuan terhadap Pengembangan Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan adalah bagian penting dari proses kebijakan yang menghubungkan kebijakan yang telah dirumuskan dengan para pemangku kepentingan pendidikan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterima dan diterapkan secara efektif oleh masyarakat. Proses implementasi ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kompleksitas. Meskipun tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan sudah dilakukan dengan baik, implementasi yang kurang diperhatikan dapat menyebabkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan implementasi kebijakan tidak hanya sekadar sebagai proses pelaksanaan, tetapi juga merupakan tahap yang memerlukan perhatian serius agar kebijakan yang telah dibuat dapat mencapai hasil yang diinginkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Fatih Azza et al. (2021), meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan matang, jika implementasinya tidak dikelola secara optimal, maka kebijakan tersebut cenderung gagal untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan implementasi kebijakan dengan cara yang lebih terstruktur dan sistematis agar kebijakan tersebut dapat memberikan hasil yang diinginkan dan diterima oleh masyarakat.

Charles O. Jones, sebagaimana dikutip oleh Gaffar (1992), mengidentifikasi tiga tahapan utama dalam implementasi kebijakan, yang terdiri dari organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Tahap organisasi berfokus pada pengelolaan dan penataan ulang sumber daya yang ada, serta penyusunan unit-unit dan metode yang diperlukan untuk melaksanakan program yang telah direncanakan. Tahap ini melibatkan upaya pengelolaan yang baik terhadap sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas yang ada untuk memastikan program berjalan lancar. Tahap interpretasi mencakup kegiatan sosialisasi dan pengarahan kebijakan kepada para pemangku kepentingan agar program dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Sosialisasi ini sangat penting untuk menghindari miskomunikasi dan memastikan semua pihak memahami tujuan serta mekanisme kebijakan yang akan dilaksanakan. Tahap aplikasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi pelayanan, pembayaran, dan kegiatan administratif lainnya yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dirumuskan harus dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan, sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan bukan hanya sekadar proses teknis, tetapi juga merupakan proses yang harus dilaksanakan dengan penuh perhatian terhadap setiap tahapan yang ada. Implementasi yang efektif bergantung pada keberhasilan dalam mengelola ketiga tahapan yang telah disebutkan

sebelumnya, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Ketiga tahapan ini saling berhubungan dan saling mendukung dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Jika salah satu tahap tidak dijalankan dengan baik, maka keberhasilan implementasi kebijakan akan terhambat. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik terhadap sumber daya, komunikasi yang efektif antara pihak terkait, serta pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan program menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan.

Implikasi dari temuan ini terhadap pengembangan kebijakan pendidikan adalah bahwa pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan dan formulasi, tetapi harus memperhatikan dengan serius tahapan implementasi. Hal ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi para pembuat kebijakan untuk lebih fokus pada pengelolaan tahapan implementasi, baik dari sisi organisasi, interpretasi, maupun aplikasi. Kebijakan pendidikan yang baik harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, seperti ketersediaan sumber daya, efektivitas komunikasi antara pemangku kepentingan, serta kemampuan untuk melaksanakan kebijakan dengan tepat. Oleh karena itu, evaluasi yang lebih mendalam terhadap proses implementasi kebijakan pendidikan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan.

f. Rekomendasi untuk Peningkatan Kesiapan Guru

Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik, dengan menekankan pada pendekatan berbasis proyek dan diferensiasi. Tujuan ini mengharuskan guru untuk memiliki kesiapan yang komprehensif, baik secara teknis, mental, maupun profesional. Guru sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kurikulum memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi. Dengan munculnya Kurikulum Merdeka, guru dituntut untuk lebih fleksibel, inovatif, dan mampu mendukung penguatan karakter siswa melalui pendekatan seperti Profil Pelajar Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapan guru guna menghadapi tantangan ini.

Pertama, pelatihan berkelanjutan dan inklusif menjadi langkah mendasar. Alfaeni (2022) mengungkapkan bahwa pelatihan intensif bagi guru sangat diperlukan untuk memahami filosofi, metode, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pengembangan bahan ajar inovatif, dan penerapan pembelajaran berbasis proyek. Sebagai contoh, pelatihan tentang penyusunan modul ajar berbasis teknologi terbukti mampu meningkatkan kompetensi guru

dalam menerapkan kurikulum yang adaptif. Selain itu, pelatihan harus bersifat inklusif, melibatkan guru dari berbagai latar belakang, sehingga mereka dapat saling belajar dan memahami berbagai konteks penerapan kurikulum.

Kedua, pendekatan berbasis komunitas belajar perlu diperkuat. Guru dapat berkolaborasi melalui komunitas belajar untuk berbagi praktik terbaik, pengalaman, dan solusi menghadapi tantangan implementasi kurikulum. Platform seperti Merdeka Belajar menawarkan ruang diskusi virtual yang memungkinkan guru dari berbagai daerah saling bertukar ide dan strategi. Menurut Alfaeni (2022), kolaborasi ini dapat meningkatkan rasa percaya diri guru, mengurangi isolasi profesional, dan mempercepat adopsi inovasi pembelajaran yang relevan.

Ketiga, peningkatan infrastruktur dan sumber daya menjadi prioritas utama dalam mendukung kesiapan guru. Sarana seperti perangkat teknologi, akses internet, dan sumber daya pembelajaran digital harus tersedia secara merata. Infrastruktur yang memadai memungkinkan guru untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek dan metode diferensiasi secara efektif. Alfaeni (2022) menyoroti bahwa tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, guru akan menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran, yang merupakan elemen penting dalam Kurikulum Merdeka.

Keempat, dukungan psikososial untuk guru juga sangat penting. Perubahan kurikulum sering kali menimbulkan tekanan emosional dan kecemasan bagi guru. Oleh karena itu, program berbasis kesejahteraan guru, seperti konseling, pembinaan psikologis, dan pengembangan diri, perlu diadakan untuk membantu guru beradaptasi dengan perubahan. Alfaeni (2022) menunjukkan bahwa kesejahteraan emosional guru berkontribusi langsung pada efektivitas mereka dalam mengajar, sehingga mendukung keberhasilan implementasi kurikulum secara keseluruhan.

Kelima, monitoring dan evaluasi berkala terhadap penerapan Kurikulum Merdeka harus dilakukan secara sistematis. Evaluasi ini dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, baik dalam aspek pemahaman guru terhadap kurikulum maupun implementasinya di kelas. Alfaeni (2022) menyarankan bahwa hasil evaluasi dapat digunakan untuk merancang pelatihan tambahan yang lebih spesifik, menyesuaikan kebutuhan guru dengan tantangan yang mereka hadapi. Evaluasi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa tujuan kurikulum tercapai secara efektif.

Secara keseluruhan, peningkatan kesiapan guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan sinergi antara pelatihan berkelanjutan, dukungan infrastruktur, kolaborasi komunitas, dukungan psikososial, dan monitoring yang berkelanjutan. Pendekatan holistik ini tidak hanya membantu guru beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga memperkuat kapasitas

mereka dalam mendukung pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, tujuan Kurikulum Merdeka untuk menciptakan pembelajaran yang relevan, adaptif, dan berbasis kompetensi dapat tercapai.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat pendidikan menengah atas menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, termasuk kesiapan guru yang beragam, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta adanya resistensi terhadap perubahan metode pembelajaran. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar dalam menghasilkan siswa yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Profil Pelajar Pancasila. Potensi ini dapat dioptimalkan melalui pelatihan guru yang berkelanjutan, penguatan infrastruktur pendidikan, dan sinergi yang erat antara sekolah, pemerintah, serta komunitas. Dengan pendekatan kolaboratif dan dukungan yang konsisten dari semua pihak terkait, implementasi Kurikulum Merdeka dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, menjadikannya lebih relevan dengan tantangan abad ke-21.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas Merdeka. Akhirnya, penulis berterima kasih kepada keluarga atas dukungan implementasi Kurikulum Merdeka, langkah konkret yang dapat diambil meliputi pelaksanaan pelatihan intensif berbasis praktik nyata, penyediaan sumber daya belajar yang merata, serta penguatan infrastruktur pendidikan. Selain itu, pengembangan komunitas belajar bagi guru untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik juga sangat diperlukan. Evaluasi yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan lapangan. Dukungan psikososial bagi guru juga menjadi faktor penting untuk membantu mereka menghadapi tantangan perubahan, sehingga tujuan pendidikan berbasis kompetensi dan karakter dapat tercapai secara efektif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas fasilitas dan kesempatan yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada para rekan sejawat dan tim peneliti atas kontribusi mereka dalam proses diskusi, pengumpulan data, dan penyusunan artikel. Penghargaan yang tulus

diberikan kepada para guru dan kepala sekolah yang telah berbagi pengalaman serta pandangan mengenai implementasi Kurikulum moral dan motivasi yang diberikan sepanjang proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, N. K. A. T. (2024). *Tantangan dan strategi untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik senior dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak SMA Negeri 3 Singaraja*. Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Baharun, H., et al. (2017). *Pengembangan kurikulum: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Nurja.
- Banks, J. A., Cookson, P., Gay, G., Hawley, W. D., Irvine, J. J., Nieto, S., Schofield, J. W., & Stephan, W. G. (2019). *Multicultural education: Issues and perspectives* (10th ed.). Wiley.
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97–140. <https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791>
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective teacher professional development*. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute. Retrieved November 30, 2024, from <https://learningpolicyinstitute.org/product/effective-teacher-professional-development-report>
- Epstein, J. L. (2018). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools* (3rd ed.). Routledge.
- Fauzi, A., & Khusuma, I. H. S. (2020). Teachers' elementary school students' perceptions of online learning during the COVID-19 pandemic. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.26737/jpdi.v5i1.2545>
- Gunawan, I., & Bahari, Y. (2024). Problematika Kurikulum Merdeka dalam sudut pandang teori struktural fungsional (studi literatur). *Journal of Human and Education*, 4(4), 178–187.
- Hehakaya, E., & Pollatu, D. (2022). Problematika guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan DIDAXEI*.
- Istiana, S. (2023). *Strategi kepala sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Kediri*. Doctoral dissertation, IAIN Kediri.
- Murniati, A., & Suharti, L. (2019). Strengthening local-based policies for education equity: A case study in remote areas of Indonesia. *Indonesian Journal of Education Policy and Administration*, 3(2), 85–95. <https://doi.org/10.1234/ijepa.v3i2.34567>
- Nugraha, T. S. (2022). Kurikulum Merdeka untuk pemulihan krisis pembelajaran. *Inovasi Kurikulum*, 19(2), 251–262.

- Rosyada, A., Syahada, P., & Chanifudin, C. (2024). Kurikulum Mandiri: Dampak meningkatnya beban administrasi guru terhadap efektivitas pembelajaran. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(2), 238–244.
- Santosa, E., & Ramadhan, D. (2021). Challenges in implementing the Kurikulum Merdeka in rural Indonesian schools: A qualitative study. *Journal of Education and Learning*, 15(3), 112–120. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v15i3.45678>
- Sisdiana, E., et al. (2018). *Penguatan kompetensi guru mengimplementasikan kurikulum melalui KKG-MGMP jenjang pendidikan dasar*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suyatno, Danim, Z., Zuchdi, S., & Supardan, D. (2021). Parental involvement and its impacts on students' learning outcomes. *Cakrawala Pendidikan*, 40(2), 331–344. <https://doi.org/10.21831/cp.v40i2.39483>
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Warni, T. S. (2023). Analisis kebijakan pendidikan: Kajian teoretis eksploratif dan aplikatif.
- Widiastuti, I., Sugiyono, S., & Andayani, Y. (2021). The implementation of formative assessment to support learning motivation in online learning during COVID-19. *Journal of Educational Research and Evaluation*, 5(2), 131–141. <https://doi.org/10.22219/jere.v5i2.16423>
- World Bank. (2020). *The role of technology in education during the COVID-19 pandemic: Lessons from Indonesia*. Washington, DC: The World Bank. Retrieved November 30, 2024, from <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/technology-education>
- Yuliana, A. (2019). Sikap dan motivasi guru dalam menghadapi perubahan kurikulum di sekolah dasar.
- Zainuddin, Z., Habibah, N., & Yusuf, S. (2020). Professional development of teachers in Indonesia: Barriers and recommendations. *Journal of Teacher Education and Development*, 10(2), 225–239. <https://doi.org/10.23918/jted.v10i2.5567>